PENGARUH KESEHATAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2020

¹Nurlaila Maysaroh Chairunnisa

²Yuha Nadhirah Qintharah

^{1,2}Universitas Islam 45 Bekasi, Jalan Cut Mutia No.83, Kota Bekasi, Jawa Barat

Surel : yuha.nadhirah@gmail.com

Abstrak. Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesehatan, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap kemiskinan. Sampel pada penelitian ini adalah kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2020. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda. Penelitian ini menemukan bahwa kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan upah minimum kota/ kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sebesar apapun UM kota/ kabupaten yang diatur oleh pemerintah baik kota ataupun kabupaten, jika sumber daya manusia pada daerah tersebut tidak memiliki *skill* atau pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, maka sebesar apapun UM kota/ kabupaten tidak akan berpengaruh pada kemiskinan.

Kata kunci: Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Kemiskinan

Abstract. The Effect of Health, Education Level, and Minimum Wage on Poverty in West Java Province in 2019-2020. This study aims to examine the effect of health, education level, and minimum wage on poverty. The sample in this study was the city and district of West Java Province in 2019-2020. Analysis of the data in this study using multiple regression. This study found that health had no effect on poverty, education had a significant negative effect on poverty, and the city/district minimum wage had no effect on poverty. No matter how big the city/district MW is regulated by the city or district government, if the human resources in the area do not have the skills or education that are required by industry, no matter how big the city/district MW is, it will not affect poverty.

Keywords: Health, Education Level, Minimum Wage, Poverty

PENDAHULUAN

Dikutip dari berita yang dilansir pada *website* pemerintah Jawa Barat, persentase angka kemiskinan warga Jawa Barat, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dalam rentang bulan Oktober 2019 - Maret 2020, alami peningkatan. BPS Jabar menyebutkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta

jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen dari Rp. 399.732,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 410.988,- per kapita per bulan. Dari data yang tercatat dalam BPS tahun 2019 dan 2020 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada perpindahan tahun tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin yang berada di pulau Jawa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribuan Jiwa)

Provinsi	Jumlah			
	2019		2020	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
DKI JAKARTA	365,55	362,30	480,86	496,84
JAWA BARAT	3 399,16	3 375,89	3 920,23	4 188,52
JAWA TENGAH	3 743,23	3 679,40	3 980,90	4 119,93
DI YOGYAKARTA	448,47	440,89	475,72	503,14
JAWA TIMUR	4 112,25	4 056,00	4 419,10	4 585,97
BANTEN	654,46	641,42	775,99	857,64

Sumber: BPS, 2021

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua terbesar di pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin berjumlah sebesar 4.118 dan pada tahun 2019 sebanyak 3.375. Artinya, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sudah ada bersamaan dengan permasalahan kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Sulistyanto, 2010) dalam (Islami, 2013).

Penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan sarana serta prasarana untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kriteria dari kemiskinan yang umum digunakan dan diterima secara luas adalah rendahnya pendapatan karena pendapatan mencerminkan standar rill masyarakat. Standar hidup rill masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat (Mubyarto, 1996). Akan tetapi, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat tidak akan maksimal apabila tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat (Andriani & Wahyudi, 2015). Berdasarkan studi Nasikun pada tahun 1987 yang terdapat pada Sairin, Efenddi dan Dahlan (1992) dalam (Ali Fahmi, SE, 2014) menemukan bahwa status kesehatan dan gizi pekerja berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat. Dalam hal ini tercermin daya tahan tubuhnya

untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Selain faktor kesehatan, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor kemiskinan, dimana menurut Mudrajat Kuncoro (1997) dalam Didu & Fauzi (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastraamadja, 2003) dalam Didu & Fauzi (2016).

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi masalah di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dimana beberapa anggapan yang menyatakan bahwa dengan kualitas pendidikan yang baik maka akan memperbaiki tingkat kemiskinan. Kualitas pendidikan yang baik dianggap bisa memberikan dampak bagi masa depan, sehingga dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dianggap bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga, dengan pekerjaan yang layak tersebut akan memberikan upah. Upah yang diperoleh tersebut dianggap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, selain

kesehatan dan pendidikan, upah minimum juga dianggap berpengaruh pada kemiskinan.

Pendapatan bisa menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kemiskinan. Bagi Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UM adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UM untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Sedangkan UM kota/kabupaten ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan pihak-pihak lain.

Berdasarkan beberapa pemaparan penjesalan diatas maka penelitian ini akan mengambil variabel dependen kemiskinan dan tiga variabel independen yakni kesehatan, pendidikan dan upah minimum. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari *website* Badan Pusat Statistik dengan jangka waktu 2019-2020. Sehingga, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020”.

TELAAH LITERATUR

Terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun jika disederhanakan, setidaknya untuk keperluan penelitian ini, maka terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni teori lingkaran kemiskinan dan *human capital theory*. Kedua paradigma tersebut pertama yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural dan yang kedua secara individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemiskinan ataupun dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang berusaha mengatasi kemiskinan.

1. Teori Lingkaran Kemiskinan

Menurut Regnar Nurkse dalam (Faisal, 2013) teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena produktivitas rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk rendah, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung dimana tabungan merupakan

sumber pembentukan modal masyarakat. Sedangkan menurut teori perangkat kemiskinan yang dikemukakan oleh Maltus menjelaskan bahwa suatu saat pertumbuhan penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada. Ketika keadaan ini terjadi, maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk yang berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin.

Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya kesehatan pada masyarakat akan menyebabkan rendahnya produktivitas karena tidak adanya kemampuan masyarakat untuk bekerja keras. Sehingga, dianggap bahwa semakin rendahnya kesehatan akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hipotesis ini selaras dengan yang

dinyatakan oleh (Andriani & Wahyudi, 2015) bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana et al., 2018) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa Kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. *Human Capital Theory*

Dalam teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan memperluas kesempatan bekerja. Rendahnya akses ke kesempatan bekerja masyarakat miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Sehingga, semakin rendahnya pendidikan masyarakat maka, akan semakin meningkatkan

tingkat kemiskinan di sebuah wilayah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh (Didu & Fauzi, 2016) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, Sudarti, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Tingkat pendidikan juga erat kaitannya dengan upah pekerjaan, rendahnya pendidikan akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Jadi, semakin rendah upah minimum masyarakat maka, tingkat kemiskinan akan semakin besar. Demikian juga yang dipaparkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Romi & Umiyati, 2018) bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian, hipotesis ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andriani & Wahyudi, 2015) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negative terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

H₂ : Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

H₃ : Upah minimum kota/kabupaten berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dengan menjadikan kota/kabupaten yang berada pada provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kota/kabupaten yang dijadikan objek dalam penelitian, data ini disebut data *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 tahun yakni pada tahun 2019-2020, data ini disebut data *time series*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk data panel, data panel merupakan data yang menggabungkan antara data *cross section* dan data *time series*. Seluruh data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dikarenakan terdapat satu variabel dependen yakni, Kemiskinan dan tiga variabel independent yakni, Kesehatan, Pendidikan dan Upah Minimum. Uji asumsi klasik dan uji hipotesis juga akan dilakukan dalam penelitian ini untuk melengkapi proses pengujian statistik.

Kemiskinan menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini kemiskinan akan dilambangkan dengan KMK dan data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah presentase kemiskinan tiap kota/kabupaten yang berada pada provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni, Masdar Mas'ud (2020) bahwa dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi indikator untuk mengukur Kesehatan dalam

penelitian ini dan dilambangkan dengan KSH.

Pendidikan dalam definisi BPS adalah proses dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan dilambangkan dengan PDK dan menggunakan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur Pendidikan dalam penelitian ini. Dengan mengambil data-data yang berada pada kota/kabupaten objek penelitian yang sudah dijelaskan diatas.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Chalid & Yusuf, 2014). Penelitian ini menggunakan besaran upah minimum di tiap kota/kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat sebagai pengukuran dari variabel Upah Minimum yang kemudian dilambangkan dengan UM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Tabel 2
Uji Normalitas

	Unstandardize d Residual
N	54
Normal Parameters ^{a, b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.86448198
Most Extreme Differences	
Absolute	.109
Positive	.109
Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z	.803
Asymp. Sig. (2-tailed)	.540

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 2 nilai *kolmogrov-smirnov* sebesar 0,540, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KSH	.420	2.382
PDK	.417	2.397
UMK	.990	1.010

Berdasarkan tabel 3 nilai *tolerance* pada semua variabel independen lebih dari 0,10 ($> 0,10$) dan nilai VIF pada semua variabel independen kurang dari 10 (< 10), maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terkena gejala multikolinieritas.

Tabel 4
Uji Heterskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.442
KSH	.770
PDK	.839
UMK	.074

Berdasarkan tabel 4 nilai signifikan pada semua variabel independen lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini bersifat homogen atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Autokolerasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.03887
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	24
Z	-1.099
Asymp. Sig. (2-tailed)	.272

a. Median

Berdasarkan tabel 5 nilai signifikan *run test* sebesar 0,272 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokolerasi.

Analisis Regresi

Hasil regresi dari pengujian pengaruh kesehatan, pendidikan, dan upah minimum kota/ kabupaten terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$KMK = 50,681 - 2,421KSH - 1,104PDK - 2,463UMK$$

Berdasarkan hasil regresi di atas, nilai kemiskinan sebesar 50, 681 jika kesehatan, pendidikan, dan upah minimum kota/ kabupaten bernilai 0. Nilai koefisien regresi variabel

kesehatan sebesar -2,421 yang berarti bahwa jika kesehatan naik satu satuan maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 2,421 dengan kondisi variabel independen lainnya

konstan. Koefisien regresi untuk variabel pendidikan bernilai -1,194 yang berarti bahwa jika nilai pendidikan naik satu satuan maka nilai kemiskinan akan turun sebesar -1,104 dengan kondisi variabel independensi lainnya bersifat

konstan. Nilai koefisien regresi upah minimum kota/ kabupaten sebesar -2,463 yang berarti bahwa jika nilai upah minimum kota/ kabupaten naik satu satuan maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 2,463.

Koefisien Determinasi

Tabel 6

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.512	.483	1.91960

a. Predictors: (Constant), UMK, KSH, PDK

Berdasarkan tabel 6 nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,483 atau 48,3%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemiskinan dijelaskan oleh variabel kesehatan, pendidikan, dan upah minimum kota/ kabupaten sebesar 48,3%. Sedangkan sisanya 51,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Uji F dan Uji t

Tabel 7

Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	193.682	3	64.561	17.520	.000 ^a
Residual	184.244	50	3.685		

Total	377.926	53			
-------	---------	----	--	--	--

a. Predictors: (Constant), UMK, KSH, PDK

b. Dependent Variable: KMK

Berdasarkan tabel 7 dinyatakan bahwa model dikatakan layak karena nilai signifikan sebesar 0,00 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 5%.

Tabel 8

Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.173	.035
KSH	-.832	.410
PDK	-3.880	.000
UMK	-1.284	.205

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kesehatan berpengaruh negatif pada kemiskinan, hipotesis pertama ditolak hal ini dikarenakan nilai signifikannya sebesar 0,410 lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kesehatan tidak berpengaruh pada kemiskinan, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andriani & Wahyudi (2015) dan Mardiana et al. (2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2013), kesehatan tidak berpengaruh pada kemiskinan karena angka harapan hidup tidak menjadi sebuah jaminan bahwa

seseorang dapat bekerja dengan baik. Usia produktif, kesehatan fisik, dan kesehatan mental lebih mencerminkan kesehatan seseorang bila dibandingkan dengan angka harapan hidup.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pendidikan berpengaruh negatif pada kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan memperluas kesempatan bekerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Didu

& Fauzi (2016) serta penelitian yang dilakukan Azizah & Sudarti (2018).

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah UM kota/ kabupaten berpengaruh negatif pada kemiskinan. Jika melihat pada tabel 8 nilai signifikan hipotesis ketiga sebesar 0,205, dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 atau 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, UM kota/ kabupaten tidak berpengaruh pada kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2013). Sebesar apapun UM kota/ kabupaten yang diatur oleh pemerintah baik kota ataupun kabupaten, jika sumber daya manusia pada daerah tersebut tidak memiliki *skill* atau pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, maka sebesar apapun UM kota/ kabupaten tidak akan berpengaruh pada kemiskinan.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan upah minimum kota/ kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Fahmi, SE, M. S. (2014). Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, Regresi Linear Berganda. *Jurnal Development*, 89–103.
- Andriani, E., & Wahyudi. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(9), 50.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Elda Wahyu Azizah, Sudarti, H. K. (2018). Pengaruh Pendidikan,

- Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50.
<https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2437>
- Nadia Islami, A. A. (2013). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nurwahyuni, Masdar Mas'ud, S. A. & A. D. (2020). Journal of Management Science (JMAS). *Journal of Management Science (JMAS)*, 1(3), 26–36.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7.